

TAJUK RENCANA

Berharap PPKM Level 4 DIY Turun

STATUS PPKM di DIY masih berada di level 4. Konsekuensi, pembatasan mobilitas masyarakat lebih diperketat dibanding level di bawahnya. Misalnya terkait dengan jumlah pengunjung di destinasi wisata dipbatasi paling banyak 25 persen dari kapasitas yang ada. Pertanyaannya, siapa yang mengontrol atau mengawasi ?

Inilah pentingnya kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk taat pada kebijakan pemerintah, khususnya terkait pemberlakuan PPKM level 4 di DIY. Mengam semua berharap agar Level 4 bisa segera turun menjadi Level 3, 2 atau 1, sehingga pembatasan mobilitas lebih longgar dan masyarakat lebih leluasa dalam beraktivitas.

Status PPKM level 4 bukan hanya berimplikasi pada pembatasan pengunjung di destinasi wisata saja, melainkan juga di tempat publik seperti mal atau tempat perbelanjaan. Pelaku usaha dituntut disiplin menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai skrening untuk memantau pengunjung. Sayangnya, belum semua pelaku usaha menerapkannya. Inilah yang kini terus didorong pemerintah daerah agar pelaku usaha disiplin menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Meski secara nasional ada tren kasus Covid-19 mengalami penurunan signifikan seiring gencarnya program vaksinasi ke masyarakat, namun kondisi saat ini belum benar-benar bebas. Artinya, penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas, masih tetap berlaku. Apalagi untuk DIY yang notabene masih berstatus PP-KM level 4, selayaknya penerapan proses lebih diperketat.

Namun kita justru disuguhi pemandangan yang ironis, yakni banyaknya warga yang abai prokes, tidak memakai masker, berkerumun dan sebagainya. Kiranya sudah tepat bila pemerintah daerah tegas memberlakukan Perda tentang Pencegahan Covid-19, sehingga mereka yang melanggar dikenai sanksi, mulai dari teguran lisan hingga pengenaan denda administratif. Dengan cara itu, mereka akan taat prokes, meski mungkin dengan rasa terpaksa.

Kalau kita menginginkan status PPKM di DIY segera turun, maka tidak ada cara lain selain memperketat penerapan prokes. Mengapa prokes menjadi kunci pengendalian Covid-19, tak lain karena tak ada lagi pembatasan orang masuk ke DIY. Pemerintah DIY tak mungkin menutup perbatasan, karena selain tidak efektif, juga berdampak serius bagi perekonomian masyarakat.

Terlebih, sangat banyak akses atau pintu masuk menuju DIY, sehingga sangat sulit membendung pengunjung. Mendorong kesadaran masyarakat untuk taat prokes haruslah dibarengi dengan penegakan aturan yakni Perda Covid-19 sehingga hasilnya akan efektif. Kesadaran tak selalu muncul secara instan, melainkan melalui proses panjang, termasuk adanya tekanan atau paksaan berupa Perda Covid-19 yang mengancam sanksi bagi pelanggaran.

Idealnya mereka memang tak perlu dipaksa agar taat prokes, namun karena sulitnya membangun kesadaran bersama, maka Perda menjadi instrumen yang cukup efektif. Kita optimis bisa segera turun status menjadi PP-KM Level 3, 2, dan seterusnya hingga DIY benar-benar terbebas dari Covid-19. □

DESTINASI wisata merupakan tempat tujuan wisata dengan bentuk yang memiliki batasan nyata atau berdasarkan persepsi, baik berupa batasan secara fisik (pulau), secara politik, atau berdasarkan pasar. Segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata tersebut merupakan daya tarik agar wisatawan asing maupun wisatawan lokal mau datang dan berkunjung ke tempat tersebut.

Secara nasional, sebelum terjadi pandemi, pada 2019 pariwisata yang merupakan *leading sector* perekonomian negara, menyumbang devisa sekitar Rp 280 triliun dengan jumlah wisatawan mancanegara 16,11 juta dan tercatat ada 282,93 juta perjalanan wisatawan nusantara. Total pariwisata Indonesia berkontribusi 63,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau 6 persen dari total PDB. Selain itu, sektor pariwisata tercatat menyerap lebih dari 12,6 juta tenaga kerja atau setara 10 persen dari jumlah tenaga kerja di Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga S Uno menargetkan pendapatan devisa di sektor pariwisata tahun 2022 mencapai 470 juta dollar AS sampai 1,7 miliar dolar AS atau setara Rp 6,7 triliun hingga Rp 24,4 triliun (kurs Rp 14.358 per dollar AS).

Berlatar belakang keindahan alam dan budaya Indonesia ditambah perkembangan pariwisata Bali yang sudah sangat mendunia, menyebabkan pemerintah berusaha untuk mengkopi apa yang sudah terjadi di Bali untuk diperluas ke daerah lain. Program pembangunan pariwisata yang akan dibangun secara intensif tersebut kemudian dipilih yang awalnya meliputi 10 ‘Bali’ baru, yaitu Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tenger-Semeru, Bangka-Belitung, dan Morotai. Namun pembagian destinasi prioritas 10 ‘Bali’ baru tersebut akhirnya dipilih 5 daerah yang dianggap super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika dan Likupang. Pembangunan 5 Bali baru tersebut tidak hanya menjadikannya sebagai daya tarik wisatawan dalam sisi keindahan alam saja , tetapi juga dapat meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif (ekraf) yang melibatkan warga setempat. Walaupun terjadi bencana nasional Covid-

Y Sigit Widiyanto

19, keseriusan pemerintah dalam pembangunan sektor pariwisata ini dibuktikan dengan mengalokasikan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN tahun 2020 berupa DAK Fisik sebesar Rp 1,003 triliun. DAK Fisik tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana pariwisata melalui penataan kawasan, aksesibilitas pariwisata dan ameni-



KR-JOKO SANTOSO

tas pariwisata. Sedang DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan dalam APBN tahun 2020 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 284,3 miliar. DAK Non Fisik ini digunakan untuk peningkatan kualitas tata kelola destinasi wisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha kepariwisataan. Di samping anggaran lewat APBN maupun APBD, keikutsertaan BUMN dalam infrastruktur pariwisata di antaranya melalui pembangunan jalan tol serta pembangunan pembangkit tenaga listrik.

Pembangunan kawasan destinasi super prioritas yang diusulkan Presiden Jokowi dan sudah disepakati dalam rapat kabinet, sehingga keputusan untuk membentuk 5 destinasi super prioritas seharusnya sudah kuat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Banyak target-target yang belum tercapai. Muncul hambatan

Festival Van der Wijck

Wahjudi Djaja

pada budaya agraris. Indonesia dikenal sebagai bangsa agraris yang kuat budayanya. Pelan tapi pasti generasi muda menjadi asing dengan budaya pertanian yang pernah menempatkan bangsa ini pada posisi terhormat. Karena itu, festival ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kembali beragam jenis adat tradisi yang berkaitan budaya agraris, produk-produk pertanian, hasil kerajinan serta beragam jejak peninggalan sejarah.

Dengan ketiga latar belakang itu penyelenggara berharap ada kolaborasi dan sinergi antara Dinas Pariwisata Sleman, BPPS, dan pemerintah Kalurahan Banyurejo Kapanewon Tempel. Bagaimanapun festival ini kelak harus menjadi milik masyarakat yang bisa dijadikan kegiatan dan andalan dalam mengoptimalkan potensi desanya. Seperti disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Sleman HY Aji Wulantara JH MHum, mantan Kadisbud Sleman yang sudah tokoh Tangisan, festival ini harus bisa mengubah lampor yang dulu sering datang dari Kali Krasa menjadi obor yang menerangi perdesaan karena dampaknya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menempatkan Selokan Van der Wijck sebagai icon festival bukan tanpa alasan. Selain memiliki karakter kuat, selokan ini merupakan model saluran Belanda yang menggunakan sistem gravitasi dan melintang di atas jalan. Sesuai prasasti yang ditemukan, selokan ini mulai dibangun pada 1 Agustus 1909. Pada masa itu, Yogyakarta memiliki 17 pabrik gula dan kawasan Sleman bagian barat merupakan sentra perkebunan tebu.

Ada kesimpangsiuran terkait keberadaan Selokan Van der Wijck dengan Kanal Yoshiro. Di sejumlah situs berita online, disebut Selokan Van der Wijck sama dengan Selokan Mataram karya Ngarsa Dalem IX. Perlu diketahui, tahun 1909 saat selokan ini dibangun,

an koordinasi maupun hambatan pema-haman pada aturan hukum. Kesepakatan di tingkat pimpinan belum tentu dapat segera dieksekusi di tingkat pelaksana. Ketakutan pada pelanggaran hukum menjadi alasan yang menyebabkan keputusan keputusan pimpinan tidak dapat dengan mudah dieksekusi.

Beberapa hambatan peraturan/perizinan dalam membangun kawasan super prioritas antara lain, tumpang tindih peraturan terkait pelaksanaan perizinan, tidak lengkapnya petunjuk pelaksanaan pelayanan perizinan, ketidakpastian standarisasi prosedur, biaya dan waktu perizinan.

Solusi terbaik agar pembangunan kawasan super prioritas cepat tercapai, harus segera ada pembenahan peraturan peraturan yang tumpang tindih tersebut. Melalui peraturan yang serius dan saling mendukung pada lintas instansi, diharapkan masing-masing pimpinan akan dengan mudah mengambil keputusan dan di tingkat pelaksana akan tidak ada hambatan untuk mengeksekusi keputusan penting yang harus segera diselesaikan.

Penanganan tata kelola pemberian izin yang lebih baik yang mengacu kepada aturan yang produktif, sebenarnya sudah dilakukan, Perintah Presiden untuk mencabut sejumlah izin pertambangan, kehutanan dan penggunaan lahan negara yang dinilai bermasalah akan memperbaiki tata kelola sumber daya alam dan akan ada pemerataan secara transparan dan adi. Hal ini sekaligus untuk mengoreksi ketidakadilan. □

*) **Y Sigit Widiyanto**, *Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik Badan Pelaksana Otorita Borobudur.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA



pikiranpembaca@gmail.com



0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Rambu Lalin Jl Magelang Hilang

BEBERAPA waktu lalu saya melewati jalan Magelang, tepatnya di depan pabrik genting Mutiara Mulungan, jalan Magelang Km 8,3. Disitu sebenarnya ada rambu dilarang belok dari arah selatan. Sayangnya, rambu itu hilang atau sudah tidak ada. Maka terlihat banyak sepeda motor dan mobil, putar balik di lokasi terse-

but. Padahal sebenarnya sangat berbahaya, bahkan rawan kecelakaan.

Mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian semua, sehingga bisa mencegah kecelakaan lalu lintas. □

*) **Aipda Eka Sapardi**, *Binmas Bulaksumur, Sucen, Triharjo, Sleman.*

Memfaatkan Air Hujan yang Berlimpah

HUJAN yang terus menerus, membuat banjir dimana-mana. Tetapi sebenarnya, air hujan bisa disimpan digunakan pada saat musim kemarau. Eman-eman jika air karunia Allah ini dibiarkan melimpah berlalu terbuang begitu saja.

Misalnya saja menyediakan bak khusus penampung air hujan. Maka dengan begitu, air hujan bisa kamu manfaatkan sebagai air penyiram tanaman, mencuci mobil atau yang lainnya. Namun disarankan disaring dan diendapkan lebih dahulu.

Yang berikutnya, bisa juga dengan Teknik membuat lubang biopori setiap sudut rumah yang mungkin sering ada genangan airnya, dengan membuat lubang biopori di tiap sudut rumah. Gampang membuatnya. Yakni dengan membuat lubang yang diisi dengan dedaunan kering, sehingga menjadi daerah resapan. Nanti akan bermanfaat saat musim kering. □

*) **M Wahib Suharman**, *kampus UNY Karangmalang Yogyakarta*

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiw, Dra Prabandari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklikanryk23@yahoo.com, iklikanryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggung-jawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No 62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten: : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang: : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Kulonprogo: : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul: : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.